AWAL BERDIRINYA PEMERINTAHAN ORDE BARU

Menjelang lahirnya pemerintahan orde baru. Indonesia menghadapi berbagai krisis yang kompleks. Kondisi ekonomi mengalami kemerosotan tajam yang ditanbdai dengan melonjoknya harga kebutuhan pokok. Selain krisis ekonomi, Indonesi juga dilanda krisis politik pascapemberontakan G30 SPKI.

1. Tiga Tuntutan Rakyat (Tritura)

   Kondisi Indonesia pada 1960-an sangat bergejolak. Presiden Sukarno memosisikan Indonesia berlawanan dengan negara-negara Barat. Sikap anti neokolonialisme dan neoimperialisme menyebabkan indonesia kehilangan dukungan dari luar negeri di bidang politik dan ekonomi. Puncaknya pada 1965 terjadi peristiwa G. 30 S/PKI. Situasi politik yang makin kacau menyebabkan sentimen anti-PKI dan anti-Sukarno makin berkembang. Memasuki tahun 1966, terjadi demonstrasi memprotes Presiden Sukarno.

   Kelompok sipil membentuk kesatuan aksi untuk menuntut penyelesaian masalah yang terjadi. Beberapa kesatuan aksi yang terbentuk pada masa itu adalah Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia (KAPI), Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI), Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia (KAPPI), Kesatuan Aksi Buruh Indonesia (KABI), dan Kesatuan Aksi Wanita Indonesia (KAWI). Pada 26 Oktober 1965 berbagai kesatuan aksi tersebut melebur menjadi satu wadah, yaitu Front Pancasila. Kesatuan aksi ini makin gencar menyuarakan pembubaran PKI.

   Dalam perkembangannya, Front Pancasila memelopori aksi Tri Tuntutan Rakyat (Tritura). Aksi Front Pancasila tersebut bermula dari gagasan yang dicetuskan oleh KAMI dan KAPPI, Adapun isi Tritura sebagai berikut.

   a. Bubarkan PKI beserta ormas-ormasnya
   b. Perombakan dan pembersihan unsur-unsur PKI dari Kabinet Dwikora.
   c. Turunkan harga kebutuhan pokok dan perbaikan ekonomi

   Tritura tidak segera dipenuhi ataupun direspons oleh Presiden Sukarno. Akibatnya, aksi unjuk rasa makin gencar dilakukan. Gelombang unjuk rasa yang terus menjalar mengakibatkan bentrokan antara pasukan Cakrabirawa dan massa aksi pada 24 Februari 1966. Bahkan, bentrokan tersebut mengakibatkan insiden berdarah yang menimbulkan jatuh korban, yaitu mahasiswa Universitas Indonesia bernama Arief Rahman Hakim.

   Peristiwa tersebut mendapat respons keras dari Presiden Sukarno. Pada 25 Februari 1966 Presiden Sukarno membubarkan KAMI. Pembubaran KAMI diprotes oleh kelompok mahasiswa Bandung dengan mengeluarkan "Ikrar Keadilan dan Kebenaran". Mahasiswa Bandung mengajak seluruh rakyat Indonesia melanjutkan perjuangan KAMI menuntut pelaksanaan Tritura. Selain itu, mahasiswa membentuk Resimen Arief Rahman Hakim untuk melanjutkan perjuangan KAMI. Protes terhadap pembubaran KAMI juga dilakukan oleh Front Pancasila. Front Pancasila meminta pemerintah meninjau kembali pembubaran KAMI.

2. Surat Perintah Sebelas Maret

   Setelah peristiwa G 30 S-PKI prsiden Sukarno melakukan dialog dengan Letnan Jenderal Soeharto. Dialog tersebut dilakukan untuk membahas upaya mengatasi situasi nasional yang kacau. Dalam dialog tersebut terjadi perbedaan pendapat antara Presiden Sukarno dan Letjen Soeharto terkait upaya penyelesaian masalah nasional Menurut Letien Sukarno kekacauan nasional tidak akan mereda apabila tuntutan rakyat dak dipenuhi, Sementara itu, Presiden Sukarno menyatakan pembubaran PKI bertentangan dengan ajaran Nasakom yang selama ini didengungkan

   Pada 11 Maret 1966 tiga perwira tinggi Angkatan Darat yaitu Mayjen Basuki Rahmat, Brigjen M. Jusuf, dan Brigjen Amir Machmud meyakinkan Presiden Sukarno bahwa ABRI, khususnya Angkatan Darat siap mengatasi segala situasi yang terjadi

Pertemuan Presiden Sukarno dengan ketiga perwira tinggi Angkatan Darat tersebut melahirkan sebuah surat berisi perintah kepada Letjen Soeharto untuk memulihkan keadaan dan kewibawaan pemerintah Surat perintah tersebut ditandatangani oleh Presiden Sukarno pada 11 Maret 1966 sehingga dikenal dengan Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar)

Dalam perkembangannya, muncul kontroversi mengenai instruksi yang sebenarnya disampaikan Presiden Sukarno dalam Supersemar. Hingga saat ini ada beberapa versi mengenai isi Supersemar. Untuk mengetahui salah satu versi Supersemar, kamu dapat melihat gambar di samping. Sebagai pemegang mandat Supersemar, Letjen Soeharto melaksanakan beberapa tindakan antara lain membubarkan dan melarang pergerakan PKI beserta organisasi massanya. Selain itu, Letjen Soeharto menyerukan mahasiswa dan pelajar untuk kembali ke kampus dan sekolah. Selanjutnya, Letjen Soeharto mengangkat lima menteri koordinator od interim menjadi Presidium Kabinet. Kelima tokoh yang terpilih untuk menjadi menteri koordinator adalah Sultan Hamengku Buwono IX, Adam Malik, Dr. Roeslan Abdulgani, K.H. Idham Chalid, dan Dr. J. Leimena. Pada Juni 1966 MPRS mengeluarkan Ketetapan Nomor IX/MPRS/1966 yang mengukuhkan kedudu Supersemar. Ketetapan MPRS tersebut menjelaskan Supersemar berlaku sampai terbentuknya MPR hasil pemilihan umum yang dilaksanakan selambat-lambatnya pada Juli 1968. Pengukuhan Supers menyebabkan Presiden Sukarno tidak bisa mencabut mandatnya kepada Soeharto.

3. Dualisme Kepemimpinan Nasional

Pengukuhan kedudukan Supersemar pada Juni 1966 menyebabkan Letjen Soeharto memiliki kewen. lebih luas dalam pemerintahan. Dalam Ketetapan Nomor XIV/MPRS/1966 dijelaskan apabila pre berhalangan, kedudukannya digantikan oleh pemegang mandat Supersemar. Dengan demikian, hukum Letjen Soeharto memiliki kedudukan setara dengan Presiden Sukarno, yaitu mandataris MPRS saat bersamaan, Presiden Sukarno masih berkedudukan sebagai kepala pemerintahan. Kondisi te memunculkan dualisme kepemimpinan Indonesia.

Dualisme kepemimpinan mulai tampak saat MPRS melalui Ketetapan Nomor xin/MPRS/1966 memberikan tugas kepada pengemban mandat Supersemar untuk membentuk Kabinet Ampera (Amanat Penderita Rakyati Kabinet Ampera diresmikan pada 28 Juli 1966 Dalam Kabinet Ampera, Presiden Sukarno menjas Letjen Soeharto wajib melaporkan jalannya pemerintahan kepada Presiden Sukarno Kabinet Ampers pemimpin kabinet, sedangkan Letien Soeharto berkedudukan sebagai kepala pelaksana pemerintahan memiliki tugas pokok menciptakan stabilitas politik dan ekonomi sekaligus memenuhi tuntutan ang terkandung dalam Tritura

Seiring legalnya kedudukan Supersemar, kedudukan Presiden Sukamo dalam pemerintahan makin lemah. Dalam sidang umum MPRS pada Juni 1966, Presiden Sukarno menyampaikan pidato pertanggungjawaban sebagai presiden yang kemudian dikenal dengan nama pidato Nawaksara. MPRS menolak pidato tersebut karena tidak banyak membahas tentang masalah G 30 S/PKI. Oleh karena itu, dalam sidang umum pada 20 Juni hingga 5 Juli 1966, MPRS meminta Presiden Sukarno melengkapi isi pidato Nawaksara Permohonan tersebut disampaikan oleh MPRS melalui nota pimpinan Nomor 2/Pimp MPRS/1966. Melalui surat tersebut, pimpinan MPRS meminta Presiden Sukarno menyampaikan pertanggungjawaban terkait peristiwa G 30 S/PK), kemunduran ekonomi, dan kemerosotan moral bangsa.

Pada 10 Januari 1967 Presiden Sukarno kembali menyampaikan pidato pertanggungjawaban di hadapan anggota MPRS dan DPR GR. Pidato tersebut dituangkan dalam Surat Presiden Ri Nomor 1/Pres/1967 dan diberi nama "Pelengkap Nawaksara" (Pelnawaksara). Dalam pidato Pelnawaksara, Presiden Sukarno menyatakan bahwa mandataris MPRS hanya mempertanggungjawabkan pelaksanaan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Presiden Sukamo juga berpendapat bahwa pidato nawaksara merupakan laporan perkembangan pemerintahan yang disampaikan secara sukarela.

Melalui pidato Pelnawaksara, Presiden Sukarno menolak pertanggungjawaban atas peristiwa G 30 S/PKI, kemunduran ekonomi, dan kemerosotan moral bangsa secara sendirian. Melalui Keputusan Pimpinan MPRS Nomor 13/8/1967, MPRS menolak pidato Pelnawaksara yang disampaikan Presiden Sukarno.

Pada 9 Februari 1967 DPR-GR mengajukan resolusi dan memorandum kepada MPRS agar mengadakan sidang istimewa untuk mengatasi situasi politik yang memanas. Sementara itu, para pimpinan ABRI berusaha membujuk Presiden Sukarno menyerahkan kekuasaan kepada pengemban Ketetapan Nomor IX/MPRS/1966, yaitu Letjen Soeharto sebelum Sidang Umum MPRS dilaksanakan. Tindakan tersebut dilakukan untuk mencegah perpecahan rakyat dan menyelamatkan lembaga kepresidenan serta pribadi Presiden Sukarno.

PENUGASAN DIKERJAKAN MAKSIMAL 23 OKTOBER 2026. KIRIM MELALUI WA

1. Jelaskan latar belakang munculnya Tritura pada tahun 1966 serta sebutkan tiga tuntutan yang terdapat dalam Tritura!
2. Jelaskan latar belakang dikeluarkannya Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) dan tindakan yang dilakukan Letjen Soeharto setelah menerima mandat tersebut!
3. Mengapa setelah pengukuhan Supersemar oleh MPRS muncul dualisme kepemimpinan nasional? Jelaskan kedudukan Presiden Sukarno dan Letjen Soeharto pada saat itu!
4. Jelaskan peran Kabinet Ampera dalam proses awal berdirinya pemerintahan Orde Baru dan apa tugas pokok yang harus dilaksanakan oleh kabinet tersebut!
5. Mengapa pidato Nawaksara dan Pelengkap Nawaksara yang disampaikan Presiden Sukarno ditolak oleh MPRS? Jelaskan kaitannya dengan melemahnya kedudukan Presiden Sukarno!